



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 800/I/2014

IV/JANUARI 2014



Penambahan Pintu Air Manggarai Diharapkan Tuntaskan Banjir Jakarta



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JANUARI 2014

Minggu keempat Januari 2014 berisikan laporan kegiatan Ketua DPR RI dalam menerima delegasi Masyarakat, dan kegiatan Alat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR baik di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan Ketua DPR RI tanggal 20 Januari 2014

1. Menerima Delegasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)

Ketua DPR didampingi oleh seorang Pimpinan Komisi X Bapak Parlindungan Hutabarat.

Audensi dilakukan dengan dihadiri oleh sekitar 600 anggota APTISI se Indonesia.

Agenda yang dibicarakan terkait permasalahan Perguruan Tinggi swasta dalam rangka pelaksanaan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pokok Pembicaraan

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memegang peranan yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasar data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tahun 2011, dari 3.151 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia, sebanyak 3.068 atau 95% merupakan PTS sedangkan 93 atau 5% adalah Perguruan tinggi negeri (PTN). Jumlah mahasiswa PTS sebanyak 2.298.830 atau 72% dibandingkan jumlah mahasiswa PTN sebanyak 907.323 (28%). Jumlah dosen PTS sebanyak 122.092 (50%) dari jumlah dosen PTN 273.734.

Permasalahan dikemukakan antara lain

- Semakin menguatnya "etatisme" dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga otonomi kampus dan kebebasan akademis berkurang. Keberadaan PTS sering diposisikan sebagai pihak yang perlu diawasi.
- Akreditasi baik di level institusi maupun program studi PT sebagaimana ditegaskan dalam UU-RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berkonsekuensi bahwa lulusan yang tidak terakreditasi, tidak diakui ijazahnya. Sementara itu, pelaksanaan akreditasi yang dilakukan selama ini kurang dari 120 PT. Keterlambatan ini sangat berpengaruh pada PT dan lulusan PT yang ijazahnya belum diakreditasi.
- Berdasar UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan



Tinggi, akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ketentuan ini meringankan beban Badan Akreditasi Nasional (BAN), namun sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga wujud kongkret dan desain LAM belum jelas

Rekomendasi yang diusulkan

- Mengingat akreditasi institusi di satu sisi merupakan perintah UU, tetapi di sisi lain waktunya tidak memungkinkan, maka hendaknya keharusan seluruh PT terakreditasi (AIPT) hingga agustus 2014, diusulkan ditunda.
- Mengingat LAM merupakan amanah UU, diharapkan PerMen segera dikeluarkan dengan catatan peraturan tersebut akan dijadikan pedoman umum pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi, baik di PTN maupun

PTS. Pemerintah tidak melepaskan tanggungjawab untuk membiayai akreditasi.

- APTISI berharap, PP dan PerMen yang akan diterbitkan lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan terhadap PTS, bukan aspek regulasi yang memberatkan dan memaksakan kehendak secara sepihak yang terkesan melemahkan PTS.

Kesimpulan hasil pertemuan

Ketua DPR RI akan segera mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Djoko Santoso untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

2. Menerima Delegasi Pengguni Rumah Susun Non Hunian ITC Manggadua. Delegasi didampingi pakar komunikasi Bapak Effendi Gozali.

Delegasi yang hadir kurang lebih 14 orang. Delegasi mengadu berkaitan dengan adanya 'penipuan terselubung' yang terjadi didalam kasus pengelolaan rumah susun non



hunian ITC Manggadua.

Jika merujuk pada UU no 20 tahun 2011 tentang rumah susun pada pasal 74 dan 75 terdapat ketentuan: bahwa pemilik rumah susun wajib membentuk PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun), PPRS tersebut beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun. PPRS diberi kedudukan sebagai Badan Hukum berdasarkan UU. Pelaku pembangunan atau *developer* wajib memfasilitasi terbentuknya PPRS, dan apabila PPRS telah terbentuk pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama kepada PPRS.

Didalam kenyataannya sampai saat ini *developer* atau pelaku pembangunan masih memegang kendali dalam pengelolaan dan bahkan membuat anak perusahaan dan anak perusahaan inilah yang memegang kendali atas PPRS yang anggotanya adalah para karyawan. Hal ini jelas tidak bisa dibenarkan. Perusahaan pengembang adalah perusahaan dibawah bendera PT. Sinar Mas, kendali atas PPRS oleh PT. Sinar Mas diberikan kepada anak perusahaannya. PPRS yang dibentuk oleh *developer* tadi melakukan tindakan bahkan melakukan kriminalisasi kepada pemilik rumah susun. Para pemilik bahkan ada yang dilaporkan polisi / Polres Jakarta Utara secara sepihak tanpa dasar. Delegasi memberikan laporan secara rinci kepada ketua DPR mengenai tindakan yang dilakukan oleh PPRS bentuk *developer*.

Ketua DPR merespon pengaduan ini bahkan akan ditidak lanjutkan bersama dengan Komisi III DPR RI. Hal ini dimaksudnya agar premanisme yang terjadi diharapkan dapat diakhiri. Tindak lanjut antara lain mengundang Kapolri untuk berdialog dan untuk mencari solusi bagi penyelesaiannya. Oleh karenanya maka diharapkan dapat menunda proses hukum yang akan dikenakan kepada para penghuni yang menurut rencana dipanggil oleh Polres Jakarta Utara, 23 Juni 2014

Kegiatan AKD

1. Bidang Legislasi

pada masa sidang III Badan Legislasi akan melaksanakan 3 agenda yaitu:

{1} Menyiapkan RUU usul DPR berdasarkan Prolegnas RUU

Prioritas tahun 2014 {2} melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah diajukan oleh Komisi Komisi sebelum RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk di tindak lanjuti {3} melakukan membahas dan atau penyempurnaan RUU sebagai mana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

RUU yang akan disiapkan sejumlah 7 (tujuh) yang meliputi draft dan naskah akademiknya. Dari 7 (tujuh) RUU tersebut 1 sudah di selesaikan draft nya yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun draft RUU yang telah di harmonisasi, dilakukan pembulatan, dan pemantapan ada 7 (tujuh) draft yaitu:

RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, pengusulnya Komisi VIII; RUU tentang Jasa Kontruksi, diusulkan oleh Komisi V; RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI; RUU tentang Sistem Perbukuan, pengusulnya Komisi X; RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengusulnya Komisi IX; RUU tentang Perubahan Atas UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diusulkan oleh Komisi VII; dan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, diusulkan oleh Komisi V;

Komisi DPR dan Panitia Panitia Khusus masih melanjutkan pembahasan atas berbagai RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat 1 antara lain RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Pemilukada, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Perubahan UU no 27 tahun 2009 tentang MD3, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah dan RUU tentang Daerah Otonomi Baru;

2. Bidang Anggaran

Badan Anggaran DPR RI dalam masa persidangan III akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2014, selain parameter indikator ekonomi makro yang belum juga membaik juga akan mencermati tantangan terhadap pelaksanaan APBN 2014, khususnya pertumbuhan ekonomi yang sudah disepakati sebesar 6,0 % target inflasi sebesar 5,5% dan mencermati tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar US. Dalam hal pelaksanaan APBN Dewan menaruh perhatian besar terhadap

masalah subsidi, pembangunan infrastruktur yang belum juga memadai sebagaimana yang diharapkan.

Badan Anggaran merencanakan melakukan RDPU dengan para pakar dalam rangka mendapatkan masukan materi untuk pembahasan RAPBN TA 2015.

3. Bidang Pengawasan

Dilakukan oleh Komisi-Komisi antara lain **Komisi II** akan mencermati *progress* dan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program e-KTP; persiapan dan pentahapan Pemilu 2014 yang dilakukan oleh KPU khususnya berkaitan dengan validasi data pemilih yang lebih akurat, penganggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, peraturan KPU dan Bawaslu, juga dimonitor mengenai persiapan terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Komisi VIII akan melakukan pembahasan dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 M/1435 H dengan membentuk Panja biaya penyelenggaraan ibadah haji. **Komisi VIII** juga berancaa melakukan kunjungan ke Arab Saudi dalam rangka persiapan ibadah haji. **Komisi IX** akan menganggendakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan terutama mengenai kesiapan pemerintah terkait dengan telah beroperasinya BPJS kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mensyaratkan pemeriksaan berjenjang bagi peserta. Hal ini menuntut perubahan paradigma berobat karena belum terbiasa dan kurangnya sosialisasi. Maka banyak peserta / masyarakat merasa sistem rujukan menyusahkan. Dari itu BPJS Kesehatan perlu menyiapkan masa transisi agar masyarakat siap.

Komisi IX juga akan melanjutkan kegiatan Panja Panja yang belum selesai antara lain Panja BPJS; Panja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia dan Panja Kesehatan Haji.

Kegiatan BAKN DPR RI antara lain melakukan Rapat Konsultasi dengan BPK RI; melakukan telaahan terhadap LHP BPKRI atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 dan melakukan Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Temuan BPKRI ke Daerah Daerah, juga menyusun program Kegiatan dalam masa persidangan ke III

Penambahan Pintu Air Manggarai Diharapkan Tuntaskan Banjir Jakarta



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama memberikan keterangan kepada wartawan.

Komisi V DPR melakukan peninjauan terhadap penambahan pintu air Manggarai dan kawasan jalan TB Simatupang, Selasa (21/1). Tim Komisi V DPR dipimpin Ketua Komisi Laurens Bahang Dama, didampingi beberapa orang anggota Komisi diantaranya Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena (F-PD), Mangara M. Siahaan (F-PDIP), Agus Bastian (F-PD).

Tim Komisi V meninjau proyek penambahan pintu air Manggarai dan jembatan TB. Simatupang yang sempat terputus akibat banjir yang melanda DKI Jakarta belum lama ini.

Saat ini tingkat kemajuan dari pekerjaan penambahan pintu air Manggarai telah mencapai lebih dari 85 persen dan ditargetkan akan rampung pada bulan Juli atau Agustus mendatang.

Sesuai laporan Kementerian PU,

penambahan pintu air Manggarai diharapkan akan meningkatkan aliran debit air dari 330 meter kubik perdetik menjadi 500 meter kubik perdetik.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengharapkan penambahan pintu air Manggarai dapat segera tuntas sehingga dapat menuntaskan persoalan banjir di DKI Jakarta.

“Kita mengharapkan proyek penambahan pintu air Manggarai dapat diselesaikan oleh anggaran APBN, selain itu, soal jalan yang putus di TB Simatupang memang tidak terduga dan kita harapkan segera selesai,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Laurens, Pintu air Manggarai sudah berumur 1 abad silam karena itu, kita mengharapkan pembangunan dapat segera selesai pada awal 2014.

“Kita minta konstruksi harus bagus dan mampu menahan air, karena memang bangunannya sudah lama sejak jaman Belanda,” ujarnya.

Ditegaskan, penanggulangan banjir harus komprehensif dan melibatkan semua pihak. “Direncanakan kita akan segera membangun waduk besar di Ciawi dan Depok semoga dapat mengurangi banjir DKI Jakarta begitu juga dengan normalisasi Ciliwung,” tandasnya.

Laurens menegaskan, masyarakat harus menjaga lingkungan agar dapat mengurangi dampak banjir. “Soal jalan rusak pasca banjir, DPR sangat mendukung segera diperbaiki jalan rusak tersebut, dan kita akan dukung dari sisi anggarannya,” jelasnya. (si), foto : hr/parole/andri*

Komisi III Bahas Kerjasama Antar Negara Hadang Kejahatan Transnasional

Kejahatan dewasa ini tidak lagi mengenal batas ruang dan tidak lagi bersifat nasional atau regional tapi bersifat transnasional, bergerak dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini disadari banyak negara termasuk Indonesia sehingga menjalin kerja sama dengan Korea dan India untuk menghadang kejahatan transnasional terorganisasi.

“Kerja sama ini dikonkritkan dalam RUU Pengesahan Perjanjian antara RI dengan Korea dan India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Kami siap mem bahas nya bersama pemerintah,” kata anggota Komisi III dari FPDIP M.Nurdin dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menkumham dan Menlu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/14).

Dalam RUU ini diatur sejumlah kesepakatan sehingga pemberantasan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum Indonesia, tapi juga dukungan dari aparat Korea dan India atau sebaliknya.

Sementara itu juru bicara FPKS Nasir Djamil menekankan kerjasama internasional ini harus memperhatikan prinsip kebersamaan, *equality* yang didasarkan kepada sikap saling menghargai dan kedaulatan dari negara-negara yang terlibat kerja sama itu.

“Kerjasama ini tidak mungkin dibuat atas dasar ketidakadilan atau paksaan salah satu pihak. Perjanjian bantuan hukum timbal balik ini bagian dari kepentingan negara untuk mendorong dan mendukung pengembalian aset dan pengejaran para pelaku tindak pidana korupsi di Korea dan India,” tekannya.

Menkumham Amir Syamsudin dalam penjelasannya mengatakan kesepakatan antara negara pihak telah ditandatangani oleh pimpinan negara beberapa waktu lalu namun baru berlaku efektif apabila telah disetujui parlemen.

“Kerja sama yang disepakati diantaranya penyidikan, penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan



Anggota Komisi III DPR M.Nurdin.

setiap kejahatan yg dapat dihukum saat bantuan diajukan pada yurisdiksi pihak berwenang. Sedangkan otoritas yang ditunjuk dalam perjanjian ini adalah Menkumham atau pihak yang ditunjuk Menkumham,” paparnya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf didengar pandangan mini seluruh fraksi yang kemudian menyepakati RUU dapat dibahas pada tahap selanjutnya. “Kita akan bentuk Panja agar dapat efektif membahas RUU ini,” demikian Muzammil. (iky) Foto:doc/parle

Iran Harapkan Kerjasama Bangun Kilang Migas di Indonesia



Ketua Delegasi GKSB Iran Ahmad Nizar Shihab bertukar cinderamata dengan Ketua Delegasi Parlemen Iran.

Delegasi Parlemen Iran mengharapkan adanya peningkatan kerjasama

dibidang energi dengan pemerintah Indonesia.

Hal itu mengemuka saat BKSAP mengadakan pertemuan dengan Parlemen Iran yang dipimpin oleh Ketua Delegasi GKSB Iran Ahmad Nizar Shihab dari Partai Demokrat, di Gedung Nusantara III, Rabu, (22/1).

Ketua Delegasi Parlemen Iran Mehdi Koocheckzadeh mengatakan, sektor swasta Iran sangat antusias bekerjasama dengan swasta di Indonesia. “Kita masih belum melihat keseriusan swasta Indonesia untuk meningkatkan kerjasamanya dengan pihak swasta di Iran,” ujarnya.

Dia mengharapkan, *Mutual of Un-*

derstanding (MOU) yang sudah disepakati harus segera direalisasikan antar kedua pemerintah. “Kita siap untuk membangun kilang-kilang di Indonesia,” terangnya.

Menurut Nizar Shihab, Parlemen Indonesia sangat mendorong berbagai MOU yang telah ditandatangani dan dise-

pakati agar segera diimplementasikan bersama Iran. “Kita akan mengundang dan duduk bersama Dubes Iran untuk mendorong MOU tersebut segera direalisasikan,” jelas Nizar tanpa menjelaskan rinci MOU yang sudah disepakati itu. (si)/foto:iwan armanias/parle/andri.

KPP-RI Terima Kunjungan Kaukus Perempuan Parlemen Aljazair



Kaukus Perempuan Parlemen RI saat menerima kunjungan Kaukus Perempuan Parlemen Aljazair.

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), Rabu (22/1) menerima kunjungan Kaukus Perempuan Parlemen Aljazair. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi tentang perpolitikan tanah air masing-masing. Selain itu membahas tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik negaranya.

Salah satu Delegasi dari Perempuan Parlemen Aljazair menanyakan tentang apa saja Undang-undang yang

dianggap menguntungkan atau berbahaya kepada perempuan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum KPP-RI, Usmawarnie Peter mengatakan bahwa salah satu Undang-undang yang sangat mengakomodir kepentingan perempuan adalah UU Tentang Pemilihan Umum yang baru saja disahkan tahun lalu.

“UU Pemilu saat ini yang mengharuskan Parpol mengirimkan 30 persen perempuan atau kadernya untuk duduk di legislatif. Hal ini tentu sangat positif

bagi perempuan untuk mengangkat berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan,” jelas Anggota Komisi V DPR RI, Usmawarnie Peter ini.

Dijelaskannya, saat ini perempuan yang duduk di legislatif jumlahnya masih delapan belas persen. Dimana dari dua puluh persen itu paling banyak Perempuan legislatif ada di Komisi X yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, Komisi IX bidang kesehatan dan tenaga kerja, serta Komisi VIII yang membidangi permasalahan perempuan.

Usmawarnie yang didampingi Ledia Hanifah, Teti Kadi, dan beberapa anggota KPP-RI lainnya berharap agar kesertaan tiga puluh persen di parlemen dapat digunakan perempuan Indonesia dengan sangat baik. Hingga kemudian perempuan parlemen dapat mewakili perempuan Indonesia secara keseluruhan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan dari perempuan Indonesia, baik di dunia politik, dunia kerja maupun di dalam rumah tangga. (Ayu) foto:rizka/parle.

Komisi IX Sesalkan Timbulnya Permasalahan Dalam BPJS



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyesalkan berbagai permasalahan yang timbul dalam program pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang baru berjalan hampir satu bulan ini.

Hal tersebut diungkapkan Ribka saat Rapat

Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Dirut BPJS, Ketua ARSADA, dan Ketua ADINKES, Senin (20/1) siang. Dikatakan Ribka, setelah mendatangi langsung masyarakat dan berbagai instansi kesehatan yang bersinggungan dengan BPJS Kesehatan. Bahkan karena banyaknya pengaduan masyarakat tentang BPJS, beberapa anggota DPR juga membuka Posko Pengaduan BPJS Kesehatan di Dapilnya masing-masing.

“Paling banyak pengaduan dari masyarakat tentang prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ditolak rumah sakit yang melayani

BPJS, karena dia belum merubah kartu Jamkesmas menjadi BPJS,” ungkap Ribka.

Dilanjutkannya, pada awalnya semangat dibentuknya BPJS itu adalah untuk memangkas birokrasi pelayanan kesehatan yang selama ini dinilai berbelit-belit. Dan sesuai amanat UUD 1945 dan UU Kesehatan, tidak ada alasan bagi penyedia pelayanan kesehatan untuk menolak pasien.

“Kalau Rumah Sakit menolak pasien itu ada sanksi hukumnya,” tegas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Diungkapkan Ribka, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat akibat pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang kurang maksimal ini. Ia khawatir kemudian akan muncul penolakan dari seluruh masyarakat Indonesia akan program ini. Dan pada akhirnya program yang sudah menghabiskan dana trilyunan ini akan sia-sia saja. Oleh karena itu Ribka mendesak Pemerintah dan BPJS untuk memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, karena kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama dari sekedar sekeras kertas BPJS yang masih bisa diurus kemudian hari. (Ayu), foto : [hr/parle/naefurodji](http://hr.parle/naefurodji)*

DPR Terima DIM RUU Pertanahan Usul Pemerintah



Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja menerima DIM RUU Pertanahan usul dari pemerintah.

Komisi II DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan usul dari pemerintah, Rabu, (22/1). Dalam DIM RUU Pertanahan tersebut, menurut Menkumham Amir Syamsuddin merupakan tanggapan komprehensif pemerintah atas RUU tentang Pertanahan yang telah disusun sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan substansi yang terdapat dalam RUU tentang Pertanahan.

Dalam DIM RUU Pertanahan yang berjumlah 568 DIM, jelas Amir, terdapat pembagian karakteristik sebagai berikut, pertama DIM yang bersifat tetap sebanyak 241 DIM, dua DIM yang bersifat substansif sebanyak 202 DIM,

DIM yang bersifat redaksional 22 DIM, DIM yang bersifat substansi baru sebanyak 92 DIM, dan DIM yang bersifat mohon penjelasan sebanyak 11 DIM.

Dalam penjelasannya dihadapan Rapat Komisi II DPR, tambah Amir, pemerintah menyadari DIM ini masih jauh dari kesempurnaan, “Untuk itu dalam kesempatan ini, Komisi II DPR RI diharapkan tetap bersedia membuka ruang diskusi dengan pemerintah guna menghasilkan kebijakan dan pengaturan yang lebih baik dibidang pertanahan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Amir.

Dikesempatan ini, Menkumham Amir Syamsuddin juga menerangkan mengenai hal-hal yang krusial dalam

DIM RUU Pertanahan tersebut yang memerlukan pembahasan secara mendalam antara pemerintah dan Komisi II DPR.

Beberapa hal yang krusial tersebut, ujar Amir, pertama, mengenai kepastian dari RUU Pertanahan ini, apakah sebagai pengganti UUPA atau untuk mengubah UUPA mengingat beberapa substansi didalam UUPA juga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan negara dibidang pertanahan.

Kedua, penyelesaian sengketa pertanahan dengan membentuk peradilan pertanahan, “Hal ini perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pembentukan lembaga peradilan,” jelasnya.

Ketiga, terang Amir, hal penggunaan ruang diatas tanah dan ruang dibawah tanah, kebutuhan hukum untuk pengaturan penggunaan ruang atas tanah dan bawah tanah oleh masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar memberikan kepastian hukum, pemerintah berpendapat agar substansi ini dapat dibahas secara mendalam.

Selanjutnya, ke empat, pengaturan mengenai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akte pemindahan hak atas tanah, hak pembebanan atas tanah,

akte pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, penetapan luas maksimum dan minimum Hak Guna Usaha (HGU) serta hak dan kewajiban pemegang HGU dengan memperhatikan juga HGU yang sudah dimiliki sebelum RUU ini diberlakukan, karena ketentuan

yang terkait dengan hal tersebut tentunya tidak dapat berlaku surut.

Dan keenam, perjanjian mengenai tanah, tanah yang bertetangga, tanah yang terlantar perlu diatur didalam UU agar dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah serta memberikan kewenangan kepada pemerintah

didalam menetapkan tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kami tegaskan kembali, pada prinsipnya pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan RUU tentang Per-tanahan dalam rapat-rapat berikutnya guna menghasilkan persetujuan ber-sama,” tegasnya. (nt)/foto:rizka/parle/iw.

Komisi X Audensi dengan Mahasiswa Undip



Komisi X DPR menerima mahasiswa UNDIP.

Suasana di Ruang Rapat Komisi X mengharu biru. Tapi ini bukan kegiatan salah satu partai politik. Namun, ini merupakan warna jas almameter 47 mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi X Agus Hermanto dan beberapa Anggota Komisi X. Ditemui usai acara, Agus menilai kunjungan mahasiswa UNDIP ini sangat positif sebagai upaya pemahaman kepada mahasiswa mengenai tugas dan fungsi DPR RI.

“Adik-adik kita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hari ini berkunjung ke Komisi X untuk meminta audiensi. Tentunya, mereka ingin mengetahui secara luas bagaimana DPR, bekerjanya, tupoksinya, dan seluruh yang berkaitan tentang DPR,” ujar Agus di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (22/01).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, generasi muda sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan pemimpin saat ini harus mempunyai pemahaman yang benar, agar terhindar dari isu negatif tentang DPR RI yang sering diberitakan oleh media.

“Oleh karena itu, pemahaman sejak dini mengenai tugas dan fungsi DPR RI agar menjadi bekal untuk mahasiswa yang mempunyai cita-cita menjadi anggota legislatif, sudah

mempersiapkan diri sejak jauh hari,” tambah Politisi asal dapil Jawa Tengah ini.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri. Ia menganjurkan kepada mahasiswa dapat belajar tentang organisasi dengan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa atau organisasi, baik di dalam maupun luar kampus.

“Dengan mengikuti organisasi, mahasiswa belajar berorganisasi dan mempunyai wawasan yang luas sehingga mempunyai pengalaman yang baik dalam menjalankan organisasi,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, itu dosen pembimbing rombongan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UNDIP Widayati berharap, dengan diadakan kajian lapangan ini mahasiswa



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Syamsul Bachri.

dapat mengimplementasikan apa saja yang diperoleh selama proses perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memperoleh informasi yang proporsional mengenai DPR RI yang tidak terungkap oleh media.

“Harapannya, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman, karena terkadang informasi yang diperoleh dari media yang tidak proporsional. Selain itu, kunjungan ini juga akan membuka wacana dan pemahaman kepada mereka. Jadi, disitulah guna membawa mahasiswa datang kesini adalah untuk memberikan informasi yang proporsional,” ujar Widayati.

Acara diwarnai dengan tanya jawab antara Anggota Komisi X dan mahasiswa, dan diakhiri dengan bertukar cinderamata. (sf,ar), foto : hr/parle/naefurodji*



Kemenkominfo Harus Tinjau Ulang Akuisisi XL dan AXIS



Anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya dalam diskusi di Press Room.

Menyusul kasus akuisisi PT XL Aviata pemegang operator XL kepada PT AXIS Telekom Indonesia pemegang operator Axis perlu ditinjau ulang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ini akan memunculkan kekhawatiran kembali tragedi Indosat yang dijual ke asing.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi I DPR RI Chandra Tirta Wijaya (F-PAN) saat menjadi pembicara dalam diskusi mingguan di Press Room DPR, Rabu (22/1). Hadir pula pakar telekomunikasi UI Gunawan Wibisono. Kasus Indosat sudah jadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Tampaknya langkah akuisisi XL kepada AXIS harus dicermati

dengan serius.

“Saya minta Kemenkominfo meninjau ulang atas akuisisi ini sebelum Pemilu,” tandas Chandra. Seperti diketahui, XL masuk ke AXIS semata-mata untuk mendapatkan tambahan spektrum frekuensi. Padahal, untuk mendapatkan tambahan frekuensi harus izin pemerintah. Kekhawatiran muncul, ketika XL dan AXIS sudah menyatu, maka mereka mendapat tambahan frekuensi hasil gabungan kedua operator tersebut. Setelah itu, mungkin nanti ada asing yang melirik untuk membelinya.

Saat ini, kata Chandra, XL menguasai 45 kavling frekuensi, menyamai Telkomsel. “Frekuensi tidak bisa diberikan cuma-cuma. Harus ada lelang yang menguntungkan negara,” jelas Chandra. Saat ini, operator seluler di Indonesia terlalu banyak. Bahkan, paling banyak di dunia. Memang, perlu ada pengurangan operator seluler, karena terlalu banyak juga tidak memiliki nilai bagi pemerintah.

Masih menurut Chandra, dengan banyaknya operator, persaingan usaha jadi sangat ketat. Perusahaan operator kian menekan harganya untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Bagi pengguna telepon seluler justru menguntungkan, karena harga pulsa semakin murah. Namun, kualitas operator juga semakin rendah. (mh), foto: hr/parle/naefurodji*

Pemerintah Harus Sigap Tangani Logistik

Kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, dan musibah banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan distribusi bahan pangan menjadi terhambat. Efeknya, harga mulai merambat naik, dan kelangkaan bahan pangan juga mulai terjadi. Menyikapi hal ini, DPR meminta pemerintah sigap menghadapi hal ini.

“Pemerintah harus sigap dan tanggap menghadapi kenaikan dan kelangkaan harga pangan. Ini harus segera diatasi, agar musibah ini tidak memberikan dampak semakin naiknya harga dan kelangkaan bahan pangan ini,” pinta Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat ditemui usai menerima kunjungan Parlemen Iran di Gedung Nusantara III, Rabu (22/01).

Politisi F-PKS ini yakin, Pemerintah pasti bisa mengatasi kondisi ini. Ia juga yakin Pemerintah memiliki upaya dalam mengendalikan kebutuhan primer masyarakat ini.

“Pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Parlemen tidak perlu ngajarin. Tinggal Pemerintah mau atau tidak. Mungkin bisa mulai dari operasi pasar, menambah pasokan bahan pangan tambahan agar sampai ke konsumen. Pemerintah pasti punya cara mengatasi hal ini. Harus mau melakukan itu,” imbuah Sohibul.

Pria berkacamata ini mengakui, sebenarnya jika ada bencana banjir atau bencana alam lainnya, memang dapat menghambat distribusi pangan mau-

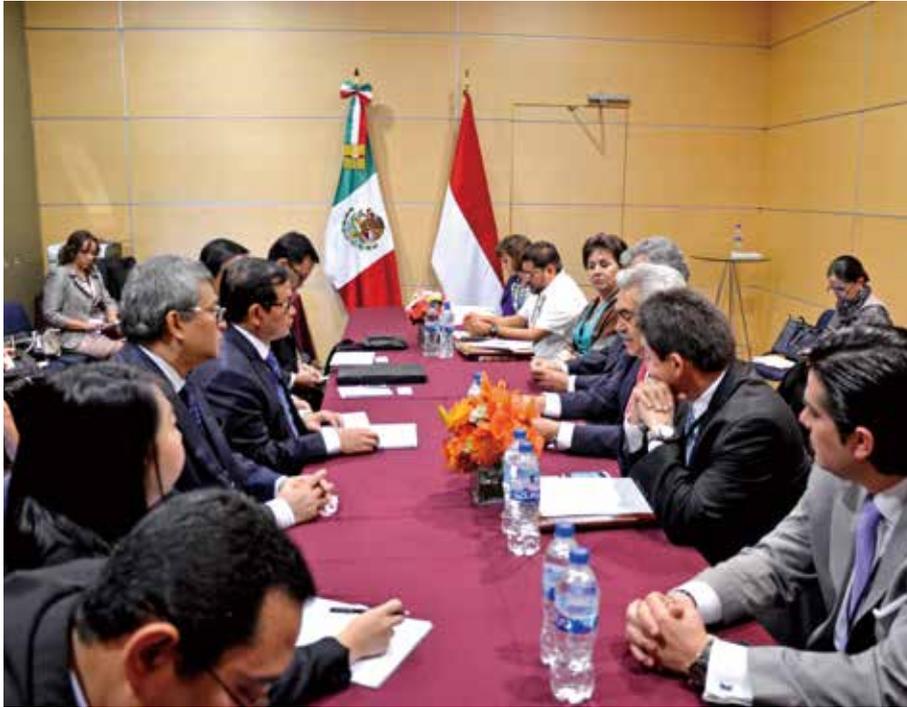


Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

pun barang lainnya.

“Itu sudah biasa terjadi ketika ada musibah atau bencana, transportasi menjadi terhambat. Termasuk penyuluran bahan pangan. Sehingga kenaikan harga pangan juga tak dihindarkan,” tukas Politisi asal Dapil Jakarta ini. (sf)/foto: iwan armanias/parle/hr.

Aktifitas Intelejen Tak Bertanggungjawab Rusak Hubungan Antar Negara



Wakil Ketua DPR Pramono Anung memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang APPF ke-22 di Puerto Vallarata, Meksiko.

Delegasi Indonesia pada Sidang APPF (*Asia-Pacific Parliamentary Forum*) ke-22 di Puerto Vallarata, Meksiko, yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 15 Januari 2014 lalu meraih kesuksesan tersendiri, yaitu menggolkan 5 (lima) Draft Resolusi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Delegasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung secara khusus mengajukan isu mengenai aktifitas intelijen yang baru-baru ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Aktifitas intelijen yang tidak bertanggungjawab, dapat merusak hubungan kerjasama antar negara yang telah terbina selama ini.

Isu lainnya adalah mengenai korupsi. APPF menyadari bahwa isu korupsi sudah menjadi isu internasional karena sifatnya yang lintas batas negara dan dapat melibatkan aktor/negara lain. Dengan demikian, kerjasama regional dalam memerangi korupsi mutlak diperlukan.

Sidang tahunan tersebut meru-

upakan forum penting bagi Indonesia untuk mengimplementasikan praktek diplomasi parlemen dan menggalang kerja sama dan dukungan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam upaya menyelesaikan berbagai isu internasional. Indonesia sendiri adalah anggota *Executive Committee* di APPF sampai dengan tahun 2015.

Menurut Pramono Anung, dalam perhelatan akbar tersebut, Sidang APPF telah mendiskusikan berbagai isu yang meliputi isu politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama regional. Isu yang paling mengemuka selama berlangsungnya Sidang APPF adalah yang bersinggungan dengan politik dan keamanan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan politik terbaru yang sedang dan masih terjadi di kawasan Asia Timur (potensi konflik di Semenanjung Korea) dan Timur Tengah (konflik bersenjata di Suriah dan perkembangan negosiasi perdamaian Israel-Palestina).

Memandang dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang terus bergeser, Ketua Delegasi Indonesia, Pra-

mono Anung menyampaikan bahwa walaupun situasi di Asia Pasifik secara keseluruhan masih tergolong stabil, ada keprihatinan terhadap konflik intra-regional yang belum terselesaikan.

Ada beberapa permasalahan yang bisa mengganggu stabilitas regional, yaitu kawasan Asia Pasifik dikelilingi oleh pantai dan lautan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan beberapa negara di kawasan masih terlibat konflik yang berkepanjangan. Selain itu, situasi keamanan di Afghanistan pasca 2014. “Tantangan untuk mempertahankan stabilitas kawasan juga dihadapkan oleh ancaman riil berupa perlombaan kekuatan militer di Laut China Selatan,” ungkap Pimpinan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Delegasi Indonesia juga secara konsisten terus menyuarakan pentingnya demokratisasi di kawasan Asia Pasifik. Demokrasi dapat memperkuat supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang stabil yang dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. Apabila demokrasi dinilai mampu untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam negeri, maka demokrasi juga merupakan jawaban bagi permasalahan global. Indonesia mendorong negara-negara di Asia Pasifik untuk membangun demokratisasi melalui *civil community*, dimana setiap anggota masyarakat secara aktif melibatkan diri dalam urusan publik, menghormati keragaman, dan ada hak serta kewajiban yang sama bagi semua.

Selengkapnya, Delegasi DPR yang hadir pada Sidang APPF ke 22 tersebut adalah Pramono Anung (Ketua Delegasi) didampingi Wakil Ketua Delegasi H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, dan anggota masing-masing Verna Gladies Merry Inkiriwang, Ida RiaSimamora, Muhammad Oheo Sinapoy, Helmy Fauzy, Muhammad Firdaus dan AndiMuawiyah Ramly. (*,mp), foto: hr/parle/docbksap*

Pemerintah Perlu Menunjuk BUMN Pengelola Pembibitan Sapi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengemukakan, untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan swasembada daging perlu diurai pokok persoalan dan sebab musababnya, yaitu krisis bibit. Ke depan, yang harus dikembangkan oleh Pemerintah hendaknya bisa menunjuk salah satu BUMN yang ditugaskan untuk memproduksi bibit sapi sebanyak-banyaknya.

“Harapan Komisi IV DPR agar ada satu BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pengelola khusus pembibitan sapi,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, Senin (20/1) di Gedung Parlemen, Senayan.

Ia mengatakan, apakah nantinya menjadi sapi betina, apakah nanti menjadi sapi potong dalam rangka mewujudkan swasembada sapi. “Kami



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo.

minta kepada Pemerintah untuk segera membuat langkah-langkah lanjutan terhadap masalah ini. Ini menjadi masalah serius, karena krisis daging potong menjadi masalah besar kalau ini dibiarkan,” ungkap Firman Subagyo.

Menurutnya, program-program yang ada pada Kementerian Pertanian belum maksimal, karena belum dapat mengatasi masalah tersebut. Jika pemerintah ingin mengimpor sapi betina pada waktu dekat ini, maka Firman mengingatkan jangan sampai terjadi peristiwa yang timbul pada waktu lalu, yaitu sapi betina yang diimpor ternyata sampai disini hanya beranak satu kali.

Masalah itu, tambah Firman harus dipertanyakan kepada pemerintah, sebab nanti kalau seperti itu lagi tidak ada gunanya.

“Yang kita inginkan adalah bagaimana meningkatkan pembinaan dan pembibitan sapi lokal,” tandas politisi Partai Golkar menambahkan. (as), foto: [he/parle/naefurodjie*](#)

Wakil Ketua DPR Terima Kunjungan Parlemen Iran

Perdagangan dan investasi menjadi salah satu perbincangan antara Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dengan Delegasi Parlemen Iran. Delegasi Parlemen yang dipimpin oleh Mehdi Koochekzadeh diterima Sohibul di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Rabu (22/01).

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Iran sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, volume perdagangan kedua negara pada 2012 cukup menggembirakan, karena mencapai US\$ 1,5 sampai 2 miliar. Kami berharap, kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara,” harap Sohibul.

Politisi F-PKS ini menambahkan, hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut lagi terkait dengan investasi minyak dan gas, karena kedua negara sama-sama memiliki potensi itu. Selain ekonomi,



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman saat menerima Delegasi Parlemen Iran.

juga dibicarakan mengenai pendidikan dan sosial budaya.

“Kami berharap, dapat terjadi pertukaran mengenai kebudayaan, se-

hingga tercipta rasa menghargai akan kebudayaan kedua negara,” harap Sohibul.

Dalam kesempatan itu, Parlemen

Iran juga mengharapkan hal yang sama. Walaupun jarak secara geografis antara Indonesia dengan Iran, cukup jauh, namun hal ini tidak menyurutkan kerjasama antara kedua negara.

“Walaupun secara geografis jarak kedua negara cukup jauh, namun dengan adanya teknologi telekomunikasi dan lainnya, dapat meminimalisir jarak kedua negara,” jelas Mehdi.

Selain itu, Parlemen Iran juga meminta diberlakukannya kembali *Visa on Arrival*. Sehingga, mempermudah keluar masuk warga negara kedua negara.

“Terkait dengan hal imigrasi, Iran berharap perlakuan *Visa on Arrival* bisa diberlakukan kembali, karena

dulu sempat sudah berlaku. Tentu hal ini kami ingin pertanyakan kepada pemerintah,” jelas Sohibul menjawab pertanyaan Mehdi.

Dalam pertemuan ini, Parlemen Iran juga mengeluhkan perlakuan yang kurang pantas dari petugas bandara maupun petugas imigrasi Indonesia terhadap turis Iran yang memasuki wilayah Indonesia. Menanggapi hal ini, Sohibul sempat mengucapkan permintaan maafnya atas nama Indonesia.

“Terkait dengan perlakuan kurang pantas dari petugas kami di bandara, kami memohon maaf kepada segenap warga Iran,” kata Sohibul.

Sohibul berharap, kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan ke-

dua negara, baik bidang ekonomi, perdagangan, maupun bidang lainnya. Diharapkan juga hal ini dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

“Harapannya, kedepannya hubungan kedua negara semakin meningkat. Bagaimanapun, kita harus membangun seluas-luasnya persahabatan dengan negara manapun, yang tentunya akan memudahkan kita berkiper di kancah internasional. Hal ini juga akan mendukung perekonomian Indonesia, semakin banyak negara yang menjalin hubungan baik dengan Indonesia, akan memperluas pasar Indonesia. Itu juga untuk menarik investor ke Indonesia,” jelas politisi asal Dapil Jakarta ini. (sf) foto: iwan armanias/parle.

IWAPI Usul KPPU Dibuat Seperti KPK



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR berdiskusi dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengusulkan pada RUU Perubahan UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibuat seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi kepada Ketua Panitia Penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Baleg DPR RI, Ahmad Dimiyati Natakusumah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1).

“Menurut kami, KPPU belum berfungsi dengan baik. Mungkin sebaiknya KPPU ini dibuat seperti KPK atau KPU”, kata Nita Yudi.

Hal tersebut dimaksudkan, agar siapapun yang akan melapor kepada KPPU akan lebih percaya diri dan aman. Karena selama ini, sepengetahuannya, KPPU belum melakukan perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, IWAPI meminta dalam RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatur masalah penetapan harga. Kata Nita Yudi, sering sekali UKM masuk ke retail modern kemudian harga itu didikte oleh retail modern.

Ia menjelaskan, bahwa 85% anggota IWAPI yang tersebar di 33 Provinsi adalah pengusaha mikro dan kecil banyak mengalami hal-hal monopoli

usaha.

“Ini yang sangat miris, karena selalu ditekan oleh harga yang sangat-sangat rendah dan pembayarannya yang sangat-sangat lama. Harusnya harga itu hanya untuk kapasitas satu bulan, mereka bisa membayar dua sampai tiga bulan. Sehingga keuntungannya bisa sangat kecil. Jadi seolah-olah jadi usaha gotong royong atau usaha yang sangat sosial,” paparnya.

Kemudian, tambah Nita Yudi, banyaknya asosiasi atau perkumpulan perusahaan dagang yang kuat cenderung melakukan kartel. Dimana hal ini menurutnya bisa merugikan kepada UKM.

Lebih lanjut, IWAPI mengusulkan pada Bab IX tentang Kebijakan Persaingan Usaha Pasal 63 ayat (3) “Dalam melakukan penilaian terhadap setiap penyusunan kebijakan pemerintah sebagaimana ayat (2) komisi melakukan koordinasi dengan kementerian yang mengkoordinir bidang perekonomian”, ditambah dengan kata “dan bidang usaha”.

Maksudnya, IWAPI minta para pengusaha diikutsertakan atau diajak urun rembuk dalam penentuan kebijakan persaingan usaha. (sc), foto: hr/parle/naefurodje*

Sektor Industri Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Dibanding UU Perindustrian lama (UU No.5/1984), UU Perindustrian baru punya paradigma baru dengan menjadikan sektor industri sebagai tulang-punggung perekonomian nasional. Untuk itu, industri yang coba didorong ke depan adalah industri yang memiliki kedalaman struktur, yaitu yang menguasai industri hulu hingga hilir dan berdaya saing tinggi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (F-PG), baru-baru ini di ruang kerjanya. Industri yang coba didorong tersebut harus memiliki basis bahan baku dalam negeri, basis tenaga kerja, dan basis energi. Industri semacam inilah yang sangat *feasible* untuk dibangun di Indonesia.

Dalam rumusan UU Perindustrian baru ini, juga telah dirumuskan tentang pembangunan sentra-sentra industri di daerah. Kelak, ada wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil menengah.

“Jadi, sentra industri itu menjadi sesuatu yang penting. Industri harus berdiri pada wilayah tertentu. Hal ini juga diatur dalam UU,” jelas Airlangga.

Sementara untuk pengembangan industri kecil tentu sudah mendapat perhatian yang cukup. Industri kecil tidak bisa dilepaskan begitu saja untuk bersaing dengan industri besar.

Keberpihakan pada industri kecil menengah terlihat dari rumusan Bab VIII, Pasal 72-76. Di tangan pemerintah pemberdayaan industri kecil menengah dilakukan. “Apalagi nanti masuk 2015 ada pasar terbuka ASEAN. Jangan sampai UKM kita kalah sama UKM-UKM negara lain,” harap Airlangga.

Bahkan, industri hijau juga mendapat perhatian serius dalam UU ini. Industri hijau adalah yang produknya ramah lingkungan dengan meminimalisir limbah atau memanfaatkan bahan daur ulang. Ada apresiasi yang bisa diberikan untuk para pelaku pengembangan industri hijau ini. Menurut Airlangga, mereka bisa diberikan benefit fiskal tertentu.

Pada bagian lain, Airlangga juga memaparkan tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri. UU Perindustrian baru tersebut sudah cukup memberi perhatian soal ini. Harus ada keberpihakan pada produk dalam negeri yang digariskan dalam bentuk TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

Belanja barang oleh pemerintah maupun Pemda harus mengutamakan produk dalam negeri. Ini demi pemberdayaan industri dalam negeri, walupun harganya sedikit lebih mahal. Secara rinci hal ini dibahas dalam pasal 85-90 UU Perindustrian yang baru.

“Jadi, dalam setiap produk itu diharapkan ada prosentase tingkat produk dalam negerinya. Pemerintah saat melakukan pembelian barang diberikan keleluasaan untuk memilih produk dalam negeri dengan nilai tertentu, walaupun, misalnya, produk dalam negeri itu harganya lebih tinggi sedikit daripada produk impor. Di sinilah adanya semangat keberpihakan,” tutur Airlangga. (mh), foto: iw/parle/hr.

Komisi VII DPR Dukung Penghapusan Subsidi Listrik Untuk Industri

Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi listrik untuk kalangan industri.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Dirut PLN Nur Pamudji yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan



Anggota Komisi VII DPR Asfhani.

Bhatoegana, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa, (21/1).

Menurut Sutan, penghapusan subsidi listrik secara bertahap untuk pelanggan industri menengah I3 yang *go public* dan industri besar I4 serta penerapan tarif *Adjustment* terhadap pelanggan listrik non subsidi rumah tangga besar R3, bisnis menengah B2, bisnis besar B3 dan kantor pemerintah sedang P1.

“Kenaikan itu dihitung tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014,” jelas Sutan saat membacakan kesimpulan Raker Komisi VII DPR tersebut.

Sementara Asfihani (Fraksi PD) mengatakan, Raker ini merupakan kelanjutan dari Rapat Banggar lalu terkait subsidi listrik “DPR meminta jangan sampai subsidi memberatkan APBN,

karena itu kita meminta rinci perusahaan *go public* mana yang tidak boleh menerima subsidi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, subsidi untuk rakyat miskin pada sektor listrik mencapai sekitar 56 persen. “Setuju kita berjuang untuk mensubsidi rakyat untuk 450 VA dan 900 VA,” tandasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/odjie.

Ali Maschan Moesa Sampaikan Ceramah Maulid di DPR

Umat Islam diminta tidak lupa Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama ini sebagai Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pesan ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Ali Maschan Moesa saat menjadi penceramah dalam acara peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh anggota Korpri Setjen DPR, MPR, DPD.

“Beliau hadir membawa ajaran yang Rahmatan Lil Alamin, bukan hanya kaum muslimin saja. Umatnya juga harus begitu. Nabi bukan hanya menyelematkan manusia tapi juga alam semesta, jangankan orang non muslim, gunung, binatang pun harus diselamatkan,” katanya dalam ceramah di Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/14).

Ia menyebut Nabi Muhammad pernah dilempari batu sampai berdarah di Thaif. Pernah diancam dengan pedang yang menempel di leher tapi beliau menghadapi tantangan itu dengan tenang. Bahkan malaikat Jibril pernah mempertanyakan kenapa nabi terlalu sabar, ia bahkan siap membantu memusnahkan para pengganggu itu.

“Nabi punya cara pendekatan sendiri orang yang mengancam itu bisa ditaklukkan hatinya bahkan akhirnya masuk Islam,” lanjutnya. Ali Maschan Moesa yang juga anggota Badan Kehormatan DPR ini meminta seluruh karyawan untuk terus mempelajari hidup nabi dan menjadikannya teladan.

Bekerja sepenuh hati lanjutnya perlu tapi ingatnya dunia bukan segala-galanya. Nabi Muhammad pernah meminta



Ali Maschan Moesa memberikan ceramah Maulid di Masjid Baiturrahman DPR.

seorang sahabat mencelupkan jemarinya ke dalam gelas, ketika tangannya diangkat ia mendapat penjelasan air yang menempel di jari itulah kesenangan dunia sedangkan kenikmatan di akhirat sebanyak air di lautan.

“Itulah pada akhirnya Nabi Muhammad memilih hidup dengan sangat sederhana karena hidup di dunia hanya numpang lewat,” paparnya. Ia secara khusus juga menggarisbawahi peringatan pakar ekonomi dari Harvard yang menyebut kalau gaya hidup berlebih-lebihan, terlalu mewah terutama di Amerika Serikat kalau tidak dihentikan akan mendorong ekonomi dunia pada kehancuran.

Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti berharap seluruh kar-

yawan dapat meneladani sikap hidup Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugas sehari-hari. “Karyawan Setjen DPR, MPR, DPD harus terus berupaya meneladani nabi dalam menyikapi beragam persoalan kita yang selalu muncul. Pemahaman terhadap hal ini akan membuat kita selalu arif, tenang dan pada akhirnya memperoleh keberkahan,” ujarnya.

Peringatan Maulid Nabi kali ini mengusung tema; Dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Marilah Kita Teladani Kehidupan Rasulullah dalam Pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat pula menjalin silaturahmi diantara karyawan 3 ketsetjenan yang merupakan pendukung utama tugas anggota dewan. (iky)/foto:iwan armanias/parle/odjie.

Wakil Bicara

Komisi IX dan Pemerintah sudah menginisiasi pembentukan rumah sakit tanpa kelas di kabupaten-kabupaten yang disebut rumah sakit pratama. Ke depan tidak ada lagi RS kelas I, II atau kelas III karena adanya subsidi silang yang berada di BPJS Kesehatan, bukan di rumah sakit. Pemerintah menargetkan dalam 5 tahun seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS, tetapi DPR minta dua tahun saja, kalau 5 tahun terlalu lama. Tinggal masalahnya kesiapan fasilitas kesehatan.



Anggota Komisi IX Surya Chandra Surapaty



Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo

Bencana alam akhir-akhir ini terjadi di mana-mana. Kalau dalam rapat paripurna lalu Dewan sepakat dipotong gaji membantu korban bencana Gunung Sinabung, maka saya mengusulkan bantuan hendaknya juga didistribusikan ke daerah-daerah lain. Selain Sinabung, ada bencana banjir di beberapa wilayah, juga banjir bandang Menado. Apalagi ini tahun politik, sehingga seluruh anggota dari masing-masing daerah mungkin ditugaskan partainya untuk mendistribusikan potongan gaji itu bagi korban musibah di dapil masing-masing.

UU Perindustrian yang baru ini, bertujuan untuk mewujudkan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dan industri yang didorong ke depan itu industri yang mempunyai kedalaman struktur. Maksudnya, mulai dari hulu sampai hilir kita kuasai, terutama yang punya daya saing tinggi.



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto

Komisi IV Bahas Alih Fungsi Hutan di Lima Provinsi

Komisi IV DPR RI membahas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), mencakup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh.

“Perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS (Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta bernilai Strategis), yang ditetapkan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo, saat memimpin RDP dengan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Senin (20/1), di Gedung Parlemen, Senayan.

Usulan perubahan peruntukan yang DPCLS Provinsi Sulteng seluas 15.312 Ha, Sumsel 19.645 Ha, Maluku 3.967 Ha, Kalbar 69.294 Ha, Aceh 37.640 Ha. Rinciannya, perubahan kawasan hutan Sulawesi Tengah, HK menjadi APL seluas 5.510, dan HL menjadi APL seluas 9.802.

Sumatera Selatan, perubahan peruntukan KSA/KPA darat dan perairan menjadi APL karena pemukiman transmigrasi dan jalur transportasi air untuk masyarakat nelayan sekitar TN Sembilang seluas 12.574, dan HL menjadi APL karena pemukiman dan lahan yang telah bersertifikat sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan seluas 7.071.

Maluku, HK menjadi APL seluas 2 Ha, HL menjadi HL menjadi APL seluas



Anggota Komisi IV DPR Rosyid Hidayat.

3.955. Kalbar, HK menjadi APL seluas 33.147, HL menjadi APL seluas 36.147. Aceh, KSA/KPA darat dengan alasan pemukiman Transmigrasi Lemedame, Desa Jamur Latung dan Jamur Konyel, dan lahan garap seluas 2.630, dan HL menjadi APL dengan alasan pemukiman dan lahan yang telah bersertifikat sejak sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan seluas 35.010.

Selain itu, juga menambah usulan menjadi 13 Provinsi yang sedang dalam proses persetujuan perubahan DPCLS di DPR RI, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat telah disetujui DPR berdasarkan surat No.02/11069/DPR-RI/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Anggota DPR Rosyid Hidayat (Fraksi Partai Demokrat) mengatakan, hal ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. “Jangan sampai mengalihkan atau melegalkan yang tidak legal,” kritisnya.

Menurut Rosyid, perlu peta pergeseran hutan lindung menjadi HPL atau lainnya. “Bagaimana HPP menjadi hutan. Hutan bertambah atau tetap atau malah berkurang,” imbuhnya

Dia juga merasa heran kepada panitia tata batas. Dikatakan Rosyid, kenapa tidak sejak dulu, untuk memperbaiki tata ruang dengan menggunakan Citra satelit dan cek lapangan. “Saya minta tiap tahun laporan tata batas ke hutan kepada Komisi IV DPRRI, agar ada kejelasan,” lanjut Rosyid.

Anggota Dewan Marsanto (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), masih meragukan data yang disampaikan Dirjen Planologi, “Apakah benar data yang diberikan Dirjen, bukan tidak mempercayai tapi kita harus membuktikannya” ungkapnya.

Dirjen Planologi Kehutanan Kemhut Bambang Soepijanto, menjelaskan bahwa berdasarkan PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, dalam hal usulan perubahan peruntukan ditolak oleh DPR maka terhadap kawasan hutan yang belum mendapat persetujuan mengacu pada ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang sebelumnya.

“Jika tidak disetujui DPR akan mengambil posisi sesuai dengan tata ruang sebelumnya,” paparnya. (as), foto: hr/parole/naefurodjie*

BNPB Diminta Perhatikan Pendidikan Para Pengungsi

Di berbagai daerah di Tanah Air ada banyak bencana alam yang berlangsung cukup lama. Ini mengakibatkan waktu pengungsi bagi warga dikamp-kamp pengungsian juga bisa berlangsung berbulan-bulan lamanya. Akhirnya, pendidikan bagi anak-anak pengungsian setingkat SD pun ikut terbengkalai.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sumaryati Aryoso (F-Gerindra)

menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (21/1). BNPB sebagai badan khusus yang menangani bencana di Indonesia, diharapkan peka terhadap persoalan ini.

Terhadap kasus bencana alam yang berlangsung lama itu, Sumaryati mencontohkan pada kasus erupsi Gunung



Anggota Komisi VIII DPR Sumaryati Aryoso.

Sinabung di Sumatera Utara. Erupsi Sinabung sudah berlangsung lama dan tidak diketahui secara pasti kapan bencana itu akan berakhir. Disinilah, BNPB perlu memikirkan pendidikan anak-anak di pengungsian.

“Untuk kasus bencana yang panjang harus ada perhatian pada pendidikan anak-anak SD, baik saat bencana maupun pasca bencana,” tandas Sumaryati. Ini penting untuk menjadi perhatian BNPB, agar pendidikan anak-anak di pengungsian tetap berjalan. Tidak lagi tertinggal dengan pendidikan di daerah-daerah lain yang terbebas dari bencana.

BNPB bisa bekerja sama dengan Pemda setempat atau para relawan bencana. Alokasi anggaran untuk daerah terkena bencana tidak selalu logistik dan kebutuhan rumah tangga. Pendidikan juga merupakan kebutuhan mendesak bagi para pengungsi, apalagi yang bencananya berlangsung lama. (mh), foto: rizka/parle/hr.

Optimalkan Pelaksanaan Anggaran Sehingga Kinerja DPR Lebih Baik

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Nur Iswanto mengatakan, pihaknya telah menyusun dan merumuskan arah kebijakan umum anggaran DPR-RI tahun 2014.

Hal itu ditetapkan BURT bersama Pimpinan DPR sebagai pedoman bagi masing-masing alat kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan DPR-RI yang berbasis kinerja dengan efektif dan efisien.

Harapan itu dikatakan Nur Iswanto saat penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR tahun 2014 kepada Pimpinan AKD dan Sekjen DPR, di ruang rapat BURT, Gedung Nusantara II DPR Senayan, Selasa (21/1).

Dalam kesempatan ini Pimpinan BURT menjelaskan bahwa DPR memperoleh DIPA tahun 2014 sebesar Rp 3,260 triliun terbagi dua satuan kerja. Satuan kerja (Satker) Dewan memperoleh anggaran sebesar Rp 2,32 triliun dan Satker Setjen sebesar Rp888,38 miliar.

Dari anggaran Satker DPR tersebut dibagi kepada 18 AKD antara lain terdiri 11 Komisi, BURT, BKSAP, BAKN



Wakil Ketua BURT DPR Nur Iswanto.

dan Badan Kehormatan. Dengan diserahkannya DIPA DPR 2014 tersebut, dia berharap perlu optimalisasi, agar realisasi anggaran 2014 dapat lebih efektif dan sesuai rencana, sehingga kinerja lembaga bisa lebih baik dari sebelumnya.

Hadir dalam acara ini antara lain, Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja, Lusi Kurnia Sari dari Komisi I,

Indah Kurnia dari Komisi XI dan beberapa anggota lintas Komisi. Sedangkan DIPA Satker Setjen diterima langsung oleh Sekjen DPR Winantuningtyastiti didampingi Wakil Sekjen Ahmad-Djuned, Deputi Persidangan Slamet Sutarsono dan Deputi Perundang-undangan Johnson Rajagukguk serta para Kepala Biro dan pejabat Setjen DPR lainnya. (mp) foto: iwan armanias/parle.

Baleg Terima Masukan RUU Larangan Praktek Monopoli



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah.

Badan Legislatif DPR RI menerima masukan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Dalam rapat dengar pendapat umum, Senin (20/1) dipimpin Wakil Ketua Baleg, Ahmad Dimiyati Natakusumah, IWAPI yang diwakili Ketua Umumnya, Elza Syarif mengusulkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) kegiatan yang dilakukan pelaku usaha adalah kegiatan usaha industri bisnis, dimana industri bisnis ini tidak selalu dalam bentuk barang saja ataupun jasa saja.

Sebagai contoh, kata Elza, PSSI dimana sedang dalam proses di KPPU adanya suatu monopoli dimana seharusnya liga tidak dibatasi satu liga tetapi ada suatu perjanjian yang menjadikan di Indonesia ini sebagai satu-satunya liga. Di Inggris saja ada empat liga dengan penduduk yang hanya 11 juta sedangkan di Indonesia penggemar bola 120 juta, disinilah terjadi monopoli, terang Elza.

“Sepakbola itu sebagai industri bisnis, karena adanya transfer pemain, dampak perekonomiannya jelas dengan adanya sepak bola ada suatu pekerjaan, ada suatu *broadcasting*,

penjualan ticket dan lain-lain,” papar Elza.

Sementara, HIPMI diwakili Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Alexander Yahya Datuk menyatakan monopoli adalah hal yang negatif bila terjadi karena dua hal yaitu melakukan distorsi pada pasar dan merusak tatanan pasar yang akhirnya berimplikasi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Sehingga menurutnya, sangat penting pemerintah ataupun legislator di Indonesia untuk memonitor hal itu dan melakukan perubahan-perubahan bilamana dianggap perlu untuk memastikan monopoli tidak terjadi demi perkembangan pembangunan Indonesia.



Delegasi IWAPI, HIPMI, dan HIPPI diterima Baleg DPR.

HIPMI memberikan apresiasi daya dan prioritas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sedang dilakukan Dewan. Menurut Alex, Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat itu melahirkan ketidakadilan dan ketidakmerataan kesejahteraan.

Alex mengharapkan didalam RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 ini mencantumkan suatu bentuk kesempatan diberikan kepada setiap pengusaha lokal atau daerah dimana dilakukannya investasi.

Misalnya industri A berinvestasi besar di suatu daerah. Maka diwajibkan kepada daerah tersebut melepaskan sahamnya 10% kepada pengusaha lokal. Diperlukan mekanisme yang diundangkan, dimana diwajibkan kepada investor atau pengusaha di suatu daerah agar pengusaha lokal yang ada di daerah dan UKM tidak menjadi penonton dari proses kenikmatan investasi yang didapatkan tapi diberikan kesempatan untuk mengakuisisi hendaknya 10% dari bisnis tersebut.

Sedangkan, HIPPI diwakili Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan, Dhaniswara K.Harjono menyatakan HIPPI menyambut baik perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999. Menurutnya, kita sedikit terlambat mengantisipasi adanya perubahan. Karena dalam praktiknya menimbulkan banyak multi

interpretasi dan mengandung banyak sekali celah yang mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

HIPPI meminta defenisi dan pengertian pelaku usaha dipertegas dengan memperhatikan ukuran atau skala usaha, jenis usaha dan domisili usaha. Hal ini perlu, karena banyak sekali pengusaha asing dalam skala kecil yang masuk ke Indonesia. (sc)/foto: iwan armanias/parle/odjie.



Para Rektor Diminta Ajak Mahasiswa Tidak Golput

Ketua DPR mengajak para Rektor di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu legislatif maupun pemilu Presiden mendatang dan tidak menjadi golput (golongan putih). “Itulah fungsi bapak-bapak dan ibu-ibu selaku guru dan dosen yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) untuk mengajak anak-anak kita di kampus supaya tidak golput,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima sekitar 600-an delegasi Aptisi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Senin (20/1) sore.

Dengan berpartisipasi pada pemilu, apalagi mereka yang mempunyai kemampuan intelektual maka akan punya andil dalam memajukan demokratisasi di Indonesia. “Jangan sampai dosen-dosen tidak peduli dan bahkan menciptakan kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti dikasih sembako dan dikasih uang. Ini yang berbahaya,” tegasnya dengan menambahkan, “Karena itu saya menghimbau seluruh Rektor di Indonesia untuk mengajak mahasiswanya ikut berpartisipasi jangan golput”.

Di hadapan ratusan guru dan dosen PT dari seluruh Indonesia ini, politisi Demokrat ini menegaskan, kalau sampai kampus apolitik, salah besar. “Kampus harus berpolitik dalam konteks ilmu, bukan politik praktis. Kampus silahkan buka, membuka kesempatan kepada capres silahkan



Ketua DPR RI Marzuki Alie berdialog dengan APTISI.

ngomong. Mengapa bicara politik, itu hal yang mulia,” tegasnya.

Sebagai negara demokrasi kata Marzuki, perlu memberi kesempatan masyarakat untuk mengetahui perkembangan politik. Untuk itu seorang Rektor jangan pula bersikap apolitik dengan melarang tokoh tampil menyampaikan gagasannya dikampus. Malah kalau perlu diundang, sehingga mahasiswa akan mengetahui siapa calon pemimpin bangsa yang terbaik.

“Jadi kalau sampai ada kampus yang melarang tokoh-tokoh politik masuk, itu salah. Politik itu mulia. Sebagai

Ketua DPR, saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pendidikan politik.” sambung dia.

Ditegaskan Marzuki, kampus memegang peranan untuk melakukan perubahan. Mereka adalah generasi yang berkesempatan menikmati pendidikan di jenjang cukup tinggi. “Ini pesan penting supaya negara ini diisi oleh orang-orang yang pintar, oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih, bukan oleh mereka yang mudah diiming-imingi oleh sembako atau uang,” pungkasnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Dizolimi Jaksa, Mantan Bupati Karanganyar Lapori Komisi III

Komisi III DPR RI menerima pengaduan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat kejaksaan. Ia melaporkan sejumlah langkah yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Proses penggeledahan yang dilakukan jaksa tanpa surat perintah

dan tidak ubahnya seperti perampok. Mereka berteriak-teriak dan memaki, merengsek masuk kerumah saya bersama polisi bersenjata dan wartawan. Daftar barang yang disita juga tidak diberikan. Ibu dan keluarga saya trauma,” katanya dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/14).

Didampingi pengacara dari Kantor Otto Cornelis Kaligis and Associates ia juga membantah telah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dituduhkan jaksa. Penyalahgunaan program subsidi Kementerian Perumahan Rakyat melalui KSU Sejahtera dilakukan oleh mantan suaminya yang sudah dipidana.



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

“Saya berharap Komisi III dapat memanggil Jaksa Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengklarifikasi tindakan sewenang-wenang ini,” ujarnya sambil menahan haru. Ia juga menyerahkan sejumlah berkas dan bukti untuk mendukung penjelasan-

nya kepada komisi yang membidangi masalah hukum ini.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Harry Witjaksono menyatakan prihatin terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyelesaikan kasus yang menurutnya banyak mendapat perhatian publik.

“Ini seperti tindak teror dalam penegakan hukum oleh kejaksaan, saya minta Ibu atau tim hukum juga menyampaikan nama-nama jaksa yang melakukan pengeledahan,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS Nasir Djamil meminta pimpinan sidang Aziz Syamsudin mempertimbangkan untuk meninjau kembali



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

jadwal rapat kerja dengan mitra komisi terkait.

“Saya rasa memperhatikan laporan masyarakat yang masuk rapat kerja dengan kepolisian dan kejaksaan patut diprioritaskan,” demikian Nasir. (iky)/foto: iwan armanias/parle/andri.

Pleno Baleg Setujui Draft RUU Usul Inisiatif Komisi I dan Komisi V

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Senin (20/1) dipimpin Ketua, Ignatius Mulyono menyetujui dua draft RUU Usul Inisiatif Komisi I dan Komisi V hasil harmonisasi Baleg. Kedua RUU tersebut, yaitu RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI dan RUU Pencarian dan Pertolongan.

Mulyono menyatakan, bahwa proses harmonisasi kedua RUU tersebut selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pasalnya, konsep draft RUU yang diajukan Komisi I dan Komisi V mendekati kesempurnaan.

“Konsep draft yang disampaikan dari Komisi mendekati kesempurnaan, sehingga dalam proses harmonisasinya hanya ada beberapa pasal yang diperlukan pemantapan dan pembulatan,” kata Mulyono.

Mulyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Baleg dan staf ahli yang telah memberikan dukungan dalam proses harmonisasi kedua RUU tersebut.

Kemudian Mulyono menyerahkan kepada Komisi I dan Komisi V sebagai pengusul untuk proses pembahasan selanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Tb Hasanuddin dan Ketua Komisi V, Laurens Bahang Dama yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan terima kasih atas proses harmonisasi yang telah dilakukan Baleg.

Keduanya menyatakan bahwa selama proses penyusunan kedua RUU tersebut banyak menerima masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat, dimana masukan tersebut sudah diakomodir dalam draft RUU tersebut. (sc) foto: iwan armanias/parle/odjie.



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono.

DPR Akan Panggil Mendikbud dan Dirjen Dikti

Ketua DPR RI Marzuki Alie berjanji akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Djoko Santoso untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Salah satu permasalahan yaitu banyaknya PTS yang terancam tutup karena banyaknya PTS yang belum diakreditasi.

“Saya akan memanggil Mendikbud, Dirjen Dikti, termasuk APTISI juga. Kita duduk bersama, supaya masalah ini tidak berkepanjangan, kita ingin segera ada penyelesaian,



supaya ancaman tutupnya PTS ini bisa diantisipasi secara dini,” jelas Marzuki.

Hal ini ia sampaikan saat menerima 600-an delegasi Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia yang berada di bawah naungan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Pertemuan berlangsung di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Senin (20/01 sore).

“Perguruan Tinggi Swasta di luar Jawa terancam ditutup karena belum terakreditasi. Rasa-rasanya jika mengikuti semua ketentuan pemerintah maka bulan Agustus 2014 nanti semua PTS di luar Jawa akan bubar,” tambah Politisi Demokrat ini.

Politisi asal Dapil Jakarta ini menilai keberadaan PTS di Indonesia sangatlah penting. Pasalnya, dari 3.151 Perguruan Tinggi di Indonesia, setidaknya 3.068 atau 95% merupakan PTS. Sisanya, 5% atau 93 PT merupakan PTN.

“95% peran PTS terhadap pendidikan Indonesia suatu angka yang tidak kecil. Keberadaan PTS ini cukup penting. Jumlah PTN yang sangat terbatas menjadikan PTS memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa, namun sayang kita masih merasakan adanya diskriminasi,” imbuh Marzuki.

Ditemui sebelum pertemuan, Ketua APTISI Edy Suandi Hamid menyatakan kunjungan APTISI ke Rumah Rakyat adalah untuk menyampaikan berbagai persoalan di Perguruan Tinggi, khususnya PTS.

“Kami dari APTISI, yang berjumlah

3400-an PTS, bermaksud menyampaikan berbagai persoalan di PTS. Diantaranya Kemendikbud terlalu mengatur yaitu etatisme, yang membuat pendidikan ini jauh dari ruh-ruh akademik. Untuk regulasi memang kewenangan Kemendikbud, tetapi jangan sampai yang tidak mendidik,” jelas Edy.

Pria yang juga menjabat Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga menyampaikan permasalahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Pasalnya, pelaksanaan UU ini sudah mendekati *dateline*, namun belum ada persiapan.

“Terkait dengan pelaksanaan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini harus dikawal, karena sudah mendekati *dateline*, tetapi persiapannya sampai sekarang masih sangat jauh. Untuk melaksanakannya, setidaknya dibutuhkan 29 Keputusan Menteri, 7 Peraturan Pemerintah (PP), tapi sampai saat ini belum ada. UU ini berlaku penuh setelah 2 tahun diundangkan. Ini UU bagaimana mau berlaku jika PP belum ada?” jelas Edy.

UU No 12 Tahun 2012 mengatur bahwa PT harus memperoleh akreditasi, baik pada level institusi, maupun program studi (prosi).

PT akan diakreditasi oleh BAN, kemudian untuk program studi oleh LAM.

“Kita melihat kesiapan di Kemendikbud dan Ditjen Dikti masih sangat kurang. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) satupun belum ada. Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang sudah di-



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

beri amanah bertahun-tahun jika tidak mampu mengakreditasi,” imbuh Edy.

Dari data yang dirilis APTISI, jumlah perguruan tinggi yang telah diakreditasi masih kurang dari 120 PT dari 3.218 PT, 93 PTN, 614 Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Swasta. Selain itu ada 5.012 prodi yang akreditasi dan reakreditasinya belum diproses karena keterbatasan dana.

Edy dan segenap delegasi APTISI berharap Ketua DPR dapat menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah, sehingga PTS tidak terancam tutup.

“Harapannya, Ketua DPR dapat mendiskusikan dan menindaklanjutinya dengan Kemendikbud dan Dirjen Dikti. Ini bukanlah pemikiran sesaat, tapi dari rapat APTISI Pusat dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini,” harap Edy.

Dalam pertemuan ini juga berlangsung sesi tanya jawab antara delegasi APTISI dengan Ketua DPR RI yang didampingi Anggota Komisi X Parlimendungan Hutabarat (F-PD). (sf)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi III Terima Pengaduan Rachmawati Soekarnoputri

Komisi III DPR RI menerima pengaduan Ketua Yayasan Bung Karno, Rachmawati Soekarno Putri. Ia melaporkan lambannya kepolisian menindaklanjuti putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa dengan Sutradara film Soekarno, Hanung Bramantyo dan Produser Raam Punjabi.

“Keterangan saksi ahli dari UI Prof.

Zen Purba menyatakan Hanung dan Punjabi telah melanggar hak cipta dari naskah saya berjudul Maha Guru. Tapi Polda Metro Jaya tidak menghentikan penayangan film dan tidak menetapkan para pihak sebagai tersangka,” kata Rachmawati dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/1/14).

Putri kedua mantan Presiden Soekarno ini menyebut seharusnya setelah Pengadilan Niaga memerintahkan untuk menyita naskah dan master asli film Soekarno, aparat terkait segera menghentikan pemutaran film di seluruh bioskop.

Ia mengaku ditinggalkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.



Anggota Komisi III DPR Ahmad Basyarah.

“Pada saat saya memeriksa naskah pertama, saya bisa simpulkan Hanung

tidak mengenal Soekarno. Saya minta naskah dikoreksi. Naskah ketiga tidak pernah dikirim, kemudian ada kabar mereka sudah *shooting* di Yogya,” paparnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Ahmad Basyarah menilai putusan Pengadilan Niaga yang sudah dipelajarinya masuk kategori *executable* atau dapat dieksekusi. “Saya menilai putusan pengadilan ini *executable*. Pimpinan Komisi III perlu segera bersurat kepada pimpinan kepolisian untuk menindaklanjuti putusan pengadilan,”

tegasnya.

Sementara itu pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah masukan yang telah disampaikan dalam RDPU tersebut. “Saya sendiri sebenarnya sudah menonton film Soekarno ini, pendapat pribadi saya memang ada yang kurang pas. Jadi ini sudah ada penetapan pengadilan saya rasa tinggal dijalankan saja,” ujar dia. (iky)/foto:iwan armanias/parleandri.

Komisi VII DPR Undang Pertamina Jelaskan Kenaikan LPG 12 Kg

Komisi VII DPR mengundang Dirut Pertamina untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait kenaikan harga LPG 12 Kg dan langkanya LPG 3 kg pasca kenaikan elpiji non subsidi tersebut.

“Tujuan Rapat Dengar Pendapat kali ini yaitu kita ingin mengetahui dasar kenaikan LPG, dan berapa besaran impor LPG Indonesia saat ini,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farihal saat membuka RDP dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, di Gedung Nusantara I, Senin, (20/1).

Memasuki awal tahun 2014 PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kilogram antara Rp130.000-140.000 per tabung.

Namun karena maraknya penolakan akhirnya Pertamina merevisi kenaikan harga gas elpiji non subsidi kemasan 12 Kilogram (Kg) dari semula Rp 3.959 menjadi Rp 1.000 per Kg.

Skema Distribusi

Dalam kesempatan ini Komisi VII DPR meminta Pertamina menyusun skema distribusi terkait gas LPG 12 kg dan melakukan sosialisasi terkait kenaikan harga LPG tersebut.

“Untuk 12 Kg merupakan domain Pertamina, karena memang berdasarkan laporan mereka selalu merugi



Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farihal.

sampai Rp. 6 Triliun,” ujar anggota DPR dari Fraksi Gerindra Saifudin Donodjoyo kepada Parlemen

Pasalnya, lanjutnya, DPR mengundang Pertamina untuk menjelaskan dasar kenaikan LPG tersebut. “Pertamina juga harus melakukan sosialisasi dan mengkondisikan kenaikan tetapi secara bertahap,” tandasnya.

Kenaikan elpiji 12 kg telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Namun nyatanya yang hilang dilapangan adalah gas 3 kg. “Terlihat kita tidak mampu mengendalikan banyak pemain soal gas. Selain itu sosialisasi

juga penting dan memang Pertamina tidak boleh merugi terus,” tambah Saifudin.

Masih dalam forum ini, anggota DPR dari Fraksi PPP Usman Ja’far menyesalkan kenaikan harga gas elpiji yang terkesan mendadak. Pasalnya kenaikan tersebut menjadi ajang spekulasi sejumlah oknum untuk mempermainkan harga LPG dipasaran.

“Saya mengusulkan agar persoalan LPG dipegang oleh Pertamina 100 persen seperti halnya SPBU, dengan cara ini maka Pertamina dapat memegang kendali langsung dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya

Dengan cara tersebut meskipun gas mengalami kenaikan namun masyarakat dapat lebih mudah memperolehnya. “Sekarang harga naik berlipat namun masyarakat sulit mendapat gas,” tandas Usman.

Sementara Asmin Amin (Fraksi PKS) mengatakan, kenaikan gas telah menimbulkan kegaduhan politik. “Kegaduhan itu akibat tidak strategisnya cara menaikkan harga gas tersebut, bahkan terkesan Pertamina tidak memiliki kepekaan terhadap kenaikan harga tersebut,” ia menegaskan. (si)/foto:iwan armanias/parle.



RUU Pilkada *Deadlock*, Akan Diputuskan di Paripurna



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.

Hasil rapat Komisi II DPR memutuskan masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada akan tetap dibawa ke dalam rapat paripurna DPR.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan sampai saat ini pembahasan tingkat I di Komisi II DPR masih belum dicapai kesepakatan soal substansi RUU Pilkada ini. Menurut Agun, masing-masing fraksi masih saling mengulur sikap sehingga tidak dapat diambil kesimpulan.

“Publik juga sudah menguliti habis tentang sistem pemilihan langsung ini, dibanding sistem liberal, kapitalis, biaya mahal, rusuh dan lainnya. Sehingga bergulir pemilihan lewat DPRD,” kata dia, saat ditemui usai memimpin rapat Komisi II dengan Dirjen OTDA Kemendagri, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Politisi dari Partai Golkar itu meminta agar para pakar bertemu dan duduk bareng membicarakan manfaat dan mudarat dari sistem pemilihan langsung atau tidak langsung ini. Saat ini, lanjut Agun, ada asumsi partai yang sepakat dengan pemilihan langsung seolah-olah prorakyat dan reformis. Sedangkan kalau sepakat untuk dipilih

DPRD kembali pada zaman Orde Baru.

“Kalau semua belum jelas sikapnya, bagaimana Komisi II mau mengambil keputusan?” kata Agun mempertanyakan.

Sebagai pimpinan Komisi II DPR, Agun berharap agar RUU Pilkada ini jangan dijadikan ajang permainan kepentingan politik. Untuk itu, dia berharap agar semua fraksi menyampaikan sikapnya secara tegas agar dapat diambil keputusan. “Di komisi II mereka bicara ‘a’ saya kontak ke pimpinan fraksinya beda, itu yang pada akhirnya saya sulit untuk mengambil keputusan di Komisi III, dan itu yang mengakibatkan akhirnya RUU ini tertunda-tunda,” tegasnya.

Namun, lanjut dia, kalau belum dicapai kesepakatan, maka RUU Pilkada ini tetap akan dibawa ke sidang paripurna DPR sebelum masa reses.

“Ada kesepakatan substansi atau tidak, RUU Pilkada akan dibawa ke paripurna. Kita sudah ketuk palu,” ujarnya.

Menurut Agun, untuk proses selanjutnya, Komisi II DPR akan menyerahkan sepenuhnya pada sidang paripurna untuk pengambilan keputusan. Dikatakannya, kemungkinannya di sana akan ada lobi fraksi. Menurut dia,

kalau lobi fraksi pada waktu itu selesai, maka otomatis RUU Pilkada bisa disahkan menjadi UU.

“Kalau sehari tidak selesai, maka akan ditunda pada sidang paripurna berikutnya. Tapi bagi kami di Komisi II secara institusional telah selesai,” ujarnya menambahkan.

Saat ditanya sikap partainya, Agun menyatakan, sebagai partai yang sudah lama lahir, maka Partai Golkar akan mengikuti suara mayoritas. Menurut dia, Partai Golkar berpandangan baik dan buruk sebuah sistem, tergantung yang melaksanakannya.

“Kalau kita sepakat dengan Pilkada langsung, maka harus siap dengan konsekuensinya, begitu juga sebaliknya,” ujarnya menjelaskan.

Terkait kekhawatiran soal kualitas RUU Pilkada jika dipaksakan dibawa ke sidang paripurna karena dianggap masih tarik menarik di tingkat fraksi terkait beberapa substansi di dalam RUU tersebut. Menurut Agun, sebaliknya justru kualitas RUU itu akan lebih baik, yang berbeda hanya persoalan manajemen, pandangan dan cara kerjanya saja.

“Sebagai pimpinan Komisi II DPR yang manage RUU ini, saya berharap, isu-isu yang ada dalam RUU ini terus diangkat ke publik. Nanti saya akan jelaskan sudah sampai mana pembahasan RUU ini termasuk posisi fraksi-fraksi dalam menyikapi RUU ini. Dengan begitu, RUU ini akan lebih berkualitas, karena RUU ini pengendapannya sudah terlalu lama sekali tinggal manajemen mengelola isunya saja,” jelasnya.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pilkada berjalan alot. Masih ada perbedaan pendapat antar fraksi mengenai beberapa isu dalam RUU tersebut. Empat isu utama yang masih terjadi perbedaan, yakni, mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, sistem paket pemilihan, dan pembahasan terkait dengan politik dinasti. (nt) foto:ry/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Anggota Komisi X DPR RI Parliindungan Hutabarat menerima delegasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di ruang KK II Gedung Nusantara DPR RI, Senin (20/1) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Draft RUU Pengesahan Perjanjian antara RI dan India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana disampaikan Kemenkumham Amir Syamsuddin kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzzammil Yusuf, Rabu (22/1) Foto: HR/Parle/andri*.



Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana memimpin Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik bahas rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Kamis (23/1) Foto: Iwan Armanias/Parle.